

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan salah satu jumlah penduduk yang terbesar dan tingkat keberagaman yang tinggi. Sehingga menghadapi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial. Salah satu permasalahan sosial yang telah lama dihadapi adalah kemiskinan. Data Badan Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,22 juta jiwa (Hapsari Putri & Chairani, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi persoalan serius yang memerlukan penanganan melalui kebijakan dan program perlindungan sosial yang berkelanjutan.

Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai keterbatasan pendapatan, tetapi juga sebagai kondisi ketidakberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan secara layak. (Cahyat, 2007:4) menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan kondisi ketika individu atau keluarga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok, serta berada dalam lingkungan yang tidak menyediakan peluang yang memadai untuk meningkatkan taraf hidup atau mengurangi risiko kerentanan secara berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut Suharto menjelaskan bahwa kemiskinan adalah masalah yang dihadapi oleh semua negara, terutama negara-negara yang sedang berkembang dan masih tertinggal. Masalah kemiskinan sangat kompleks dan disebabkan oleh berbagai faktor, tidak hanya dari ekonomi saja,

tetapi juga melibatkan aspek politik, sosial, budaya, serta sistem sosial lainnya (Suharto, 2005) dalam (El Adawiyah, 2020)

Guna merespon tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis yang diarahkan pada penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial. Komitmen tersebut mewujudkan melalui penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang bersifat komprehensif, yang bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran serta meningkatkan pendapatan kelompok miskin dan rentan. Arah kebijakan ini secara resmi tertuang dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, yang menegaskan pentingnya perlindungan sosial dalam menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat serta kemampuan individu dan keluarga dalam menghadapi berbagai resiko sosial dan ekonomi. Implementasi perlindungan sosial komprehensif tersebut dilakukan melalui pengintegrasian berbagai program penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan terpadu (Kementerian Sosial, 2020) dalam (Fajar Yanti & Rukminto Adi, 2020)

Sejalan dengan kebijakan tersebut, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah meluncurkan PKH sebagai instrumen strategis dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). KPM PKH ditargetkan mampu menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM, sehingga pada akhirnya dapat menurunkan angka kemiskinan secara

signifikan (Kemensos, 2020) dalam (Suryati S et al., 2023). Dengan demikian, keberhasilan PKH tidak hanya diukur dari tersalurkannya bantuan, melainkan dari sejauh mana program tersebut mampu membantu pemenuhan kebutuhan dasar KPM.

Keberhasilan PKH tidak hanya dinilai dari tersalurnya bantuan sosial kepada keluarga miskin, tetapi juga dari capaian jangka panjang berupa tercapainya kemandirian KPM. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), kemandirian ditentukan oleh adanya peningkatan kondisi ekonomi dan tidak terpenuhinya lagi persyaratan kondisi sebagai KPM, seperti keberadaan ibu hamil atau menyusui, anak usia balita, dan sekolah, penyandang disabilitas, serta lanjut usia dalam keluarga. Apabila KPM dinilai telah mencapai tingkat kemandirian ekonomi dan tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut, maka KPM dinyatakan mengalami graduasi, yang mencerminkan keberhasilan PKH sebagai instrumen perlindungan sosial yang berorientasi pada pemberdayaan keluarga miskin (N. Khoiriyah & Kunarti, 2019)

Kelurahan Mengkurai merupakan salah satu wilayah administratif terletak di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat memiliki posisi yang strategis namun juga menyimpan tantangan yang unik. Terletak di daerah aliran sungai Kapuas dan memiliki topografi yang bervariasi, wilayah ini menjadi pusat konsentrasi penduduk dengan tingkat keberagaman aktivitas ekonomi yang cukup tinggi. Letaknya yang cukup dekat dengan aktivitas kecamatan seharusnya memberikan peluang aksesibilitas yang lebih mudah bagi KPM dalam menjangkau maupun

layanan publik. Sebagai wilayah yang sedang berkembang di Kec Sintang, masyarakat di Kelurahan Mengkurai sebenarnya memiliki akses terhadap peluang ekonomi yang cukup terbuka, mulai dari sektor perdagangan skala mikro hingga pertanian, perkebunan dan pertambangan. Keberadaan peluang ekonomi ini seharusnya menjadi stimulan bagi KPM untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Meskipun Program Keluarga Harapan (PKH) telah diimplementasikan selama bertahun-tahun di Kelurahan Mengkurai Kabupaten Sintang, pelaksanaan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan fenomena kondisi objektif di lapangan, terdapat indikasi bahwa implementasi bantuan sosial belum sepenuhnya berjalan optimal sesuai dengan tujuan program. Dana bantuan yang diberikan memang membantu meringankan beban pengeluaran keluarga, namun dalam praktiknya pemanfaatan bantuan masih didominasi untuk kebutuhan konsumsi harian sehingga belum seluruhnya mampu meningkatkan kualitas akses terhadap pendidikan dan kesehatan secara berkelanjutan. Selain itu, terdapat kesenjangan antara ketentuan program dengan realitas pelaksanaan di tingkat keluarga, seperti kurangnya pemahaman KPM terhadap tujuan program, keterbatasan pendampingan, serta kemungkinan adanya kendala administrasi dan koordinasi. Selain itu, terlihat adanya keengganan dari sebagian peserta untuk melepaskan status kepesertaannya meskipun secara fisik dan ekonomi mereka sebenarnya memiliki kapasitas untuk berkembang. Sejalan dengan temuan dalam (Silviana & Wahdatul Chilmy, 2024) ,bahwa ketergantungan pada bantuan pemerintah cenderung mengurangi motivasi masyarakat untuk berusaha mandiri dan membuat

mereka menjadi pasif. Siklus ketergantungan ini sulit diatasi karena masyarakat tidak punya inisiatif dan kreativitas dalam meraih penghasilan yang lebih baik. Selain masalah ketergantungan, penggunaan bantuan yang salah juga menghambat graduaasi untuk mencapai kemandirian peserta Pogram Keluarga Harapan. Beberapa bantuan yang tidak digunakan semestinya, seperti meningkatkan kesejahteraan keluarga dan modal usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan PKH tidak hanya ditentukan oleh besaran bantuan yang diberikan, tetapi juga oleh bagaimana implementasi program dijalankan secara efektif di tingkat kelurahan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana implementasi bantuan sosial melalui PKH dalam pemenuhan kebutuhan dasar KPM di Kelurahan Mengkurai Kabupaten Sintang.

Sebagai langkah strategis dalam mengatasi hambatan kemandirian tersebut, pemerintah telah menyediakan solusi melalui program Pendampingan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Program ini adalah proses pembelajaran terorganisir dengan tujuan mempercepat perubahan dalam cara KPM berpikir dan berperilaku (Suryati S et al., 2023)khususnya dalam pengelolaan keuangan keluarga dan motivasi kewirausahaan. Melalui modal-modal yang daam penyuluhan, KPM dibekali dengan pengetahuan mengenai cara menyisihkan bantuan untuk modal usaha produktif serta pentingnya merencanakan masa depan ekonomi agar tidak selamanya bergantung pada bantuan sosial. Harapannya, P2K2 dapat menjadi katalisator bagi perubahan perilaku ekonomi masyarakat di Kelurahan Mengkurai, sehingga bantuan finansial yang diterima dapat bertransformasi menjadi investasi sumber daya manusia dan peningkatan aset

ekonomi yang nyata. Namun, meskipun infrastruktur solusi melalui P2K2 telah tersedia, efektivitas pelaksanaannya di Kelurahan Mengkurai masih perlu diuji lebih jauh. Hal ini dikarenakan realitas lapangan menunjukkan bahwa perubahan pola pikir yang diharapkan belum sepenuhnya terjadi, yang dibuktikan dengan masih kuatnya mentalitas ketergantungan dan rendahnya angka graduasi mandiri ekonomi.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji PKH dalam kaitannya dengan kemandirian keluarga miskin. Penelitian yang dilakukan oleh (Fajar Yanti & Rukminto Adi, 2020) menjelaskan bahwa kemandirian merupakan kondisi ketika KPM keluar dari kepesertaan PKH karena adanya peningkatan kondisi sosial ekonomi, yang menunjukkan keberhasilan program dalam mendorong kemandirian Keluarga Penerima Manfaat KPM. Penelitian pada (Andini Wa Ode et al., 2023) menegaskan bahwa graduasi mandiri merupakan ciri khas bantuan sosial PKH yang membedakan dari program bantuan pemerintah lainnya, dimana berakhirnya kepesertaan KPM tidak selalu disebabkan oleh berakhirnya program, melainkan oleh perubahan kondisi ekonomi atau tidak terpenuhinya syarat kondisional program. Selanjutnya dalam penelitian oleh (Suryati S et al., 2023) menjelaskan faktor penghambat menunjukkan bahwa keterbatasan sumber penghasilan, ketergantungan terhadap bantuan sosial, serta belum optimalnya pendampingan menjadi kendala utama dalam proses graduasi ekonomi mandiri. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (A. Khoiriyah et al., 2025) menyoroti pentingnya peran pendamping dan dukungan lingkungan sosial dalam mendorong kesiapan KPM untuk mencapai graduasi mandiri, yang menunjukkan bahwa proses graduasi

tidak hanya ditentukan oleh kondisi ekonomi, tetapi juga oleh aspek sosial dan kelembagaan. Meskipun demikian, berbagai penelitian tersebut cenderung membahas graduasi dari sisi hasil, faktor penentu, atau peran secara parsial, dan belum secara mendalam mengkaji proses kemandirian KPM secara komperhensif dalam konteks lokal. Oleh karena itu, peneliti ini berupaya mengisi celah tersebut dengan memfokudskan kajian pada proses graduasi mandiri ekonomi keluarga msikin melalui PKH di Kelurahan Mengkurai Kabupaten Sintang.

Apabila fenomena ketergantungan dan rendahnya kemandirian pada KPM tidak segera diteliti dan dicarikan solusinya, maka akan segera muncul beberpa resiko jangka panjang seperti, memicu beban fiskal yang berkepanjangan bagi negara, dimana anggran bantuan sosia akan terserap oleh kelompok masyarakat yang sama tanpa adanya sirkulasi atau pergantian kepada penerima bantuan yang baru yang sebenarnya lebih membutuhkan. Kondisi ini diperparah dengan resiko program yang tidak tepat sasaran, dimana bantuan terus mengalir kepada keluarga yang secara objektif ekonomi sudah mengalami peningkatan, namun enggan melepaskan status kepesertaannya.

Pemenuhan kebutuhan dasar merupakan aspek fundamental dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin. Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu kebijakan bantuan sosial bersyarat diharapkan mampu membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, dalam praktiknya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh keberadaan bantuan, tetapi juga oleh bagaimana program tersebut diimplementasikan di tingkat lokal.

Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi bantuan sosial melalui PKH di tingkat kelurahan menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana program ini berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan, serta memberikan masukan bagi perbaikan praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kebijakan kesejahteraan sosial di tingkat daerah.

Penelitian mengenai implementasi bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi penting untuk dilakukan karena keberhasilan program tidak hanya diukur dari tersalurkannya bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tetapi juga dari sejauh mana bantuan tersebut mampu berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Pemahaman yang mendalam mengenai proses implementasi program di tingkat kelurahan diperlukan untuk mengidentifikasi bagaimana mekanisme pelaksanaan, peran pendamping, ketepatan sasaran, serta faktor pendukung dan penghambat memengaruhi efektivitas program di lapangan. Tanpa kajian yang komprehensif mengenai implementasi PKH, upaya evaluasi dan perbaikan program berpotensi tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi objektif yang dihadapi KPM. Berdasarkan fenomena, permasalahan, kesenjangan penelitian, serta urgensi yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam melalui penelitian yang berjudul “Implementasi Bantuan Sosial Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Mengkurai Kabupaten Sintang”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi bantuan sosial melalui PKH dalam pemenuhan kebutuhan dasar KPM di Kelurahan Mengkurai Kabupaten Sintang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi bantuan sosial melalui PKH dalam pemenuhan kebutuhan dasar KPM di Kelurahan Mengkurai Kabupaten Sintang?
3. Bagaimana cara mengatasi hambatan implementasi bantuan sosial melalui PKH dalam pemenuhan kebutuhan dasar KPM di Kelurahan Mengkurai Kabupaten Sintang?
4. Bagaimana implikasi praktis dan teoritis pekerjaan sosial pada implementasi bantuan sosial melalui PKH dalam pemenuhan kebutuhan dasar KPM di Kelurahan Mengkurai Kabupaten Sintang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi bantuan sosial melalui PKH dalam pemenuhan kebutuhan dasar KPM di Kelurahan Mengkurai Kabupaten Sintang?
2. Untuk mendeskripsikan apa faktor pendukung dan penghambat implementasi bantuan sosial melalui PKH dalam memenuhi kebutuhan dasar KPM di Kelurahan Mengkurai Kabupaten Sintang?
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana mengatasi hambatan implementasi bantuan sosial melalui PKH dalam pemenuhan kebutuhan dasar KPM di Kelurahan Mengkurai Kabupaten Sintang?

4. Untuk mendeskripsikan bagaimana implikasi praktis dan teoritis pekerjaan sosial pada implementasi bantuan sosial melalui PKH dalam pemenuhan kebutuhan dasar KPM di Kelurahan Mengkurai Kabupaten Sintang?

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan gambaran empiris dalam memahami pelaksanaan PKH, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar KPM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan pendamping PKH dalam memahami dinamika implementasi program, faktor pendukung dan penghambat, serta kondisi nyata yang dihadapi KPM dalam memenuhi kebutuhan dasar melalui bantuan sosial. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan akademik bagi mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial dan pihak lain yang tertarik mengkaji kebijakan perlindungan sosial, implementasi bantuan sosial, serta pemenuhan kebutuhan dasar KPM.

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan memperkaya kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial, khususnya yang berkaitan dengan konsep perlindungan sosial, kebijakan bantuan sosial, serta implementasi PKH dalam pemenuhan kebutuhan dasar KPM. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran konseptual mengenai proses implementasi bantuan sosial di tingkat lokal, sehingga dapat menjadi referensi akademik dan bahan pengembangan teori bagi penelitian selanjutnya dengan topik sejenis.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pemenuhan kebutuhan dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Mengkurai Kabupaten Sintang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan awal bagi pemerintah daerah dan pendamping PKH dalam memahami dinamika implementasi program, tantangan yang dihadapi di lapangan, serta kebutuhan KPM agar pelaksanaan PKH dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan pihak lain yang tertarik pada kajian perlindungan sosial dan bantuan sosial bagi keluarga miskin.

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Pendamping PKH

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas implementasi program, khususnya dalam memastikan bantuan sosial dapat berkontribusi secara nyata terhadap pemenuhan kebutuhan dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

2. Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi KPM mengenai tujuan dan pemanfaatan bantuan sosial PKH dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, serta mendorong pemanfaatan bantuan secara tepat sesuai dengan ketentuan program.

3. Bagi Praktisi dan Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pembelajaran bagi praktisi serta mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial dalam memahami implementasi kebijakan perlindungan sosial, khususnya terkait peran PKH dalam pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin di tingkat lokal.